

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional, tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan semata, tetapi juga mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang produktif, sehingga menghambat peningkatan kualitas hidup mereka. Di Indonesia, kemiskinan menjadi tantangan besar yang terus dihadapi, terutama karena kondisi geografis yang luas serta perbedaan tingkat pembangunan antar daerah.

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi terhenti, banyak pelaku usaha yang gulung tikar, dan jumlah pengangguran meningkat drastis akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Mobilitas masyarakat yang dibatasi, kebijakan karantina wilayah (lockdown), serta gangguan dalam rantai pasok global turut menekan PDRB Indonesia. Situasi ini menciptakan kondisi ekonomi yang lesu dan ketidakpastian yang tinggi di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut memperparah tingkat kemiskinan nasional. Banyak rumah tangga kehilangan sumber pendapatan utamanya, sementara harga kebutuhan pokok relatif meningkat. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti program bantuan sosial dan subsidi, namun dampak ekonomi dari pandemi tetap terasa hingga beberapa tahun setelahnya. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penduduk miskin pada masa-masa awal pandemi merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari tekanan krisis yang luar biasa berat di era tersebut.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu daerah dengan populasi terbesar di Indonesia, turut merasakan dampak berat dari pandemi COVID-19. Pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus menyebabkan banyak sektor usaha di Jawa Timur, terutama sektor informal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga mengalami tekanan yang signifikan. Banyak pekerja harian dan buruh yang kehilangan mata pencaharian akibat penurunan aktivitas ekonomi, sehingga angka pengangguran di Jawa Timur melonjak drastis selama masa pandemi.

Dampak pandemi di Jawa Timur mencerminkan hubungan erat antara kondisi kesehatan masyarakat, PDRB regional, dan kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial yang belum merata juga memperburuk situasi di beberapa daerah terpencil di provinsi ini. Selain itu, fluktuasi harga bahan pokok dan biaya hidup yang meningkat semakin menekan daya beli masyarakat miskin. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga memperdalam masalah kemiskinan di Jawa

Timur, memaksa pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan intervensi kebijakan yang terfokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial guna mencegah peningkatan kemiskinan yang lebih parah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini dipandang sebagai salah satu jalan utama untuk mengurangi kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan PDRB diyakini dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat kapasitas produksi nasional, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri umumnya diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Indikator ini mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, yang menjadi ukuran utama kinerja ekonomi suatu wilayah.

Namun, pandemi COVID-19 memberikan tekanan berat terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Pada tahun-tahun awal pandemi, PDRB Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berbagai pembatasan aktivitas ekonomi dan turunnya konsumsi masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi penopang utama ekonomi daerah seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan mengalami penurunan output yang tajam. Kondisi ini menyebabkan perlambatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan pemerintah daerah serta melemahnya daya beli masyarakat.

Keterkaitan pandemi COVID-19 dan PDRB di Jawa Timur sangatlah erat, perlambatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara langsung

mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada. Ketika ekonomi daerah tidak tumbuh atau bahkan menyusut, peluang kerja berkurang sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, dan banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, perlambatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama pandemi memperparah tantangan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Pemulihan PDRB pasca-pandemi menjadi prioritas utama agar ekonomi kembali positif, dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Strategi pemulihan ini menuntut sinergi antara kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang efektif serta responsif terhadap dinamika yang ada di provinsi Jawa Timur.

Pemulihan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terjadi setelah masa pandemi menjadi harapan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Ketika ekonomi mulai bergerak positif kembali, peluang kerja akan meningkat lalu pendapatan rumah tangga membaik sehingga membuat daya beli masyarakat kembali pulih. Dengan demikian, PDRB yang berkelanjutan diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan percepatan PDRB sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di masa pasca pandemi.

Secara teori, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan proses peningkatan kapasitas suatu perekonomian daerah dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan klasik, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo,

menekankan pentingnya akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan output ekonomi. Dalam pandangan klasik, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen (*New Growth Theory*) menegaskan bahwa peningkatan PDRB tidak semata-mata bergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal perekonomian daerah seperti investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengembangan teknologi (Romer, 1994). Romer (1994) menyatakan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil keputusan ekonomi yang diambil secara internal, khususnya melalui investasi pada pengetahuan dan inovasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas inovasi memiliki peranan penting dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkelanjutan.

Di sisi lain, teori *pro-poor growth* menekankan pentingnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang inklusif dan berpihak pada masyarakat miskin. Kakwani dan Pernia (2000) mendefinisikan *pro-poor growth* sebagai peningkatan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar secara relatif kepada kelompok miskin dibandingkan kelompok lain, sehingga mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Pendekatan ini menegaskan bahwa peningkatan PDRB yang efektif tidak hanya meningkatkan output daerah secara agregat, melainkan juga memastikan distribusi manfaat yang merata, terutama melalui

penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, serta peningkatan layanan sosial.

Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didorong oleh investasi pada sumber daya manusia dan inovasi, serta diarahkan melalui kebijakan *pro-poor growth*, memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kebijakan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cepat, melainkan juga menjamin pemerataan dan keberlanjutan dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dama (2016) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Artinya, semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja ekonomi regional mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja, sehingga secara langsung dapat menekan angka kemiskinan.

Sebaliknya, tidak semua penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan antara PDRB dan tingkat kemiskinan. Novita dan Nur Istiqamah (2021), dalam penelitiannya di Kabupaten Sambas, menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut belum mampu secara langsung menurunkan jumlah penduduk miskin, karena manfaat peningkatan output ekonomi daerah tidak sepenuhnya dirasakan oleh

kelompok masyarakat miskin yang masih terbatas aksesnya terhadap lapangan kerja dan sumber daya produktif.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Hana Ainin Nabila (2015) yang meneliti pengaruh PDRB, IPM, dan pengangguran di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2009–2013. Penelitian tersebut menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki arah hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum inklusif, karena distribusi hasil pembangunan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, sementara kelompok miskin tetap tertinggal. Dengan demikian, kedua penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak serta merta menjamin penurunan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan perluasan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat miskin.

Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya menekankan pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semata, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan kelompok miskin, serta pemerataan akses terhadap sumber daya produktif agar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) benar-benar dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui lama pendidikan telah lama diakui sebagai salah satu pondasi utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah atau negara untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui lama pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka berkontribusi secara aktif dan produktif dalam masyarakat. Lama pendidikan yang memadai dapat meningkatkan mobilitas sosial, membentuk tenaga kerja yang kompeten, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Oleh karena itu, lama pendidikan sering kali menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu wilayah.

Lama pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan lama pendidikan yang cukup, individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, lama pendidikan sering dipandang sebagai pilar utama dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kemiskinan tetap menjadi masalah struktural yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan pendapatan rendah, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti lama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat miskin sulit keluar dari siklus kemiskinan tanpa intervensi yang tepat.

Namun, hubungan antara lama pendidikan dan kemiskinan tidak selalu sederhana. Efektivitas lama pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi

oleh kualitas pengajaran, relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pasar kerja, serta ketimpangan akses lama pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lama pendidikan sebagai alat pengentasan kemiskinan harus dipandang dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks pembangunan manusia, lama pendidikan diyakini menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan. Individu dengan lama pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pekerjaan formal, memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan meningkatkan mobilitas sosial. Dengan demikian, lama pendidikan dapat berfungsi sebagai jembatan keluar dari kemiskinan.

Teori human capital menjelaskan bahwa lama pendidikan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kerja seseorang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan penghasilan mereka (Becker, 1964). Becker menegaskan bahwa lama pendidikan merupakan modal manusia yang meningkatkan kapasitas individu dalam berkontribusi pada perekonomian secara lebih efektif. Oleh karena itu, lama pendidikan berperan sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, teori *pro-poor* menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin dengan memastikan akses yang merata dan adil terhadap lama pendidikan sebagai salah satu instrumen utama pengentasan kemiskinan (Kakwani & Pernia, 2000). Pendekatan *pro-poor* berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh manfaat

optimal dari pembangunan, termasuk melalui peningkatan akses lama pendidikan dan peluang ekonomi. Dengan demikian, penguatan kualitas dan pemerataan lama pendidikan melalui pendekatan *human capital* dan kebijakan *pro-poor* dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Asmanata (2022) dalam penelitiannya di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2017–2020 menemukan bahwa lama pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, di mana semakin tinggi lama pendidikan penduduk, semakin rendah angka kemiskinannya. Hal serupa ditunjukkan oleh Ningrum dan Wahyuningsih (2017) yang menganalisis data di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2006–2015, menemukan bahwa peningkatan akses dan kualitas lama pendidikan berkontribusi nyata dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Kedua studi ini menekankan bahwa lama pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Meskipun lama pendidikan sering dianggap faktor penting dalam menurunkan kemiskinan, beberapa penelitian menunjukkan pengaruhnya tidak selalu signifikan. Zein dan Raehanun (2019) di Desa Mas-Mas, Lombok Tengah, menemukan bahwa lama pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa durasi lama pendidikan formal belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama jika tidak diikuti peningkatan keterampilan atau peluang kerja. Temuan serupa juga disampaikan oleh Maulidah (2015) di Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan

bahwa lama pendidikan bukanlah variabel dominan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan dibandingkan faktor lain seperti pendapatan dan konsumsi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu wilayah atau negara. Ketika angka pengangguran meningkat, banyak individu tidak memiliki sumber pendapatan tetap, yang langsung berdampak pada kualitas hidup mereka. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja, atau kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Tingkat pengangguran yang rendah memiliki peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan karena semakin banyak individu yang memperoleh pekerjaan, semakin besar pula pendapatan rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Todaro dan Smith (2012), penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja yang lebih luas memungkinkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, pengurangan pengangguran bukan hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Pengangguran yang tinggi menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, sehingga membatasi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan

memperbaiki taraf hidupnya. Todaro dan Smith (2012) menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya pendapatan, tetapi juga memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

Pengangguran merupakan isu sentral dalam kajian pembangunan ekonomi karena berdampak langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan. Dalam perspektif *Human Capital Theory*, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Becker (1993) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan kerja merupakan bentuk investasi terhadap modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ketika kualitas SDM rendah, maka tingkat pengangguran cenderung tinggi, dan hal ini akan memperburuk ketimpangan ekonomi serta memperluas jurang kemiskinan. Dalam konteks ini, pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam menyediakan akses yang merata terhadap pendidikan dan pelatihan kerja.

Sementara itu, pendekatan *Pro-Poor* menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang secara langsung menyoal kelompok miskin, termasuk dalam bentuk penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Handayani (2010), strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif harus mempertimbangkan aspek pemberdayaan, partisipasi, dan akses terhadap kesempatan ekonomi. Pengangguran yang tinggi di kalangan masyarakat miskin memperkuat siklus kemiskinan yang bersifat turun-temurun, karena ketiadaan pekerjaan berarti tidak adanya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu,

pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan pro-rakyat menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang signifikan.

Hadi dan Yasa (2023) dalam studi di Provinsi Bali, yang menyimpulkan bahwa pengangguran berperan besar dalam mendorong peningkatan angka kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, khususnya di daerah dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor informal, hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pengangguran merupakan faktor krusial yang harus ditangani secara sistematis dalam kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.

Meskipun pengangguran secara teoritis dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab kemiskinan, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Afini (2018) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, mengindikasikan adanya peran variabel lain yang lebih dominan seperti kualitas pendidikan, distribusi pendapatan, serta akses terhadap layanan sosial. Hal serupa juga ditemukan oleh Utami, Nurfalah, dan Desmawan (2021) dalam kajian di Provinsi Banten, di mana pengangguran tidak berkontribusi secara nyata terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat dahsyat terhadap pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Pembatasan aktivitas ekonomi yang ketat dan penutupan berbagai sektor usaha menyebabkan gelombang PHK dan

peningkatan pengangguran dalam skala besar dan cepat. Banyak rumah tangga di Jawa Timur yang kehilangan sumber penghasilan utama mereka secara mendadak, sehingga mengalami kesulitan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini memperburuk kesenjangan sosial dan menjerumuskan semakin banyak masyarakat ke dalam jurang kemiskinan yang dalam (ILO, 2020). Khasanah dan Ramadhani (2021) menyatakan bahwa lonjakan pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi ini menciptakan krisis sosial-ekonomi yang parah di Jawa Timur, dengan banyak keluarga yang terpaksa menghadapi ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan dan risiko kemiskinan yang semakin mengancam masa depan mereka. Oleh karena itu, penanganan pengangguran pasca pandemi di Jawa Timur bukan hanya sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan yang mendesak untuk mencegah meluasnya kemiskinan dan kerusakan sosial yang lebih besar.

Melihat tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur yang sejalan dengan peningkatan tingkat pengangguran serta maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di sektor industri, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Lama Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024.**

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diyakini memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, tanpa didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan tingkat

pengangguran, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saja belum mampu mengatasi masalah kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, studi ini berupaya menganalisis bagaimana ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur, sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan ?
2. Apakah Lama Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara empiris apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan
2. Untuk menganalisis secara empiris apakah Lama Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan
3. Untuk menganalisis secara empiris Apakah Tingkat Pengangguran Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan bukti empiris terhadap pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Lama Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemimpin dan Pemangku kepentingan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menekan angka kemiskinan melalui strategi yang lebih efektif
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja, terutama bagi lulusan sekolah menengah dan tinggi yang rentan terhadap pengangguran.
- c. Bagi Pihak Swasta, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan